BORNEO TRIBUNE

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nop | Des | 2014 | Hal. : 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gubernur Puji Keberhasilan Daerah Raih WTP

Borneo Tribune, *Pontianak*

Gubernur Kalbar Drs Cornelis, memberikan pujian dan apresiasi kepada Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten Sintang, Pemerintah Kabupaten Landak, dan Pemerintah Kabupaten Sekadau atas prestasi dalam laporan keuangan daerah yang meraih opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 oleh BPK RI.

....Ke Halaman -11

Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie, MTM memberikan arahan kepada peserta Sosialisasi Permendagri No 37/2014 Tentang Pendoman Penyusunan APBD TA 2015, Hotel Kapuas Palace. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune.

Gubernur Puji Keberhasilan Daerah Raih WTP

"Tentunya kita semua berharap, keberhasilan Kabupaten/Kota yang meraih opini WTP dapat menjadi inspirasi bagi Kabupaten/Kota yang lain dalam rangka mewujudkan pengelolaan APBD yang efektif, akuntabel, dan transparan," puji Gubernur, Kamis (26/6), dalam sambutan yang disampaikan Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie, MTM, saat membuka Sosialisasi Permendagri No 37/2014 Tentang Pendoman Penyusunan APBD TA 2015, Hotel Kapuas Palace.

Dikatakannya, dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, yakni tercapainya Indoensia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan, maka diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lebih efektif dan akuntabel. Sinergi pusat dan daerah dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berkeadilan yang didukung dengan pemantapan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menjadi tantangan utama program pembangunan nasional dan anggaran untuk tahun 2015.

"Keberhasilan dan pencapaian prioritas pembangunan secara nasional sangat bergantung dengan sinergitas kebijakan antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah, dan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pemerintah dan pemerintah Provinsi. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment dengan azas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," jelasnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), masih menurutnya, merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dengan DPRD, dan ditetapkan Perda. Dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

"Selaian sebagai rencana keuangan tahun Pemerintah daerah, APBD juga memiliki fungsi otirisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan stabilisasi," jelasnya.

ÿGubernur masih dalam sambutannya juga meminta perhatian seluruh unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah supaya mengambil langkah-langkah untuk mempercepat proses penyusunan dan pembahasan APBD, agar persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD atas Raperda Tentang APBD 2015 dpat dicapai paling lambat satu bula sebelum APBD dilaksanakan atau ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember.

"Kalau kita cermati dan dapat kita simpulkan, penyusunan APBD di beberapa wilayah Kalbar belum dapat dilaksanakan dengan tepat waktu. Tentunya, ini kurang bijak, kalau kita saling tuding terhadap keterlambatan penyusuan APBD ini," katanya.

Dijelaskannya, di dalam Permendagri No 37/2014 ini secara umum tidak jauh berbeda substansinya dengan Permendagri terdahulu tentang Pendoman penyusuan APBD. Dengan terbitnya UU 6/2014 tentang Desa, telah diberikan keleluasaan bagi Desa untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan kemasyaratan, yakni melalui alokasi pembiayaan yang relatif besar. Tentu saja ini erat kaitanya dengan administrasi pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD, baik APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota, dan hal ini menunrut kami cukup releven untuk dilakukan pendalaman pada pertemuan Sosialisasi ini.

ÿ"Pengelolaan Keuangan daerah harus transparan, mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran. Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga diperlukan. Penggunaan anggaran ini harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan, baik kepada DPRD dan masyarakat," ujarnya. (Lay).